

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Adi Awang, 2007. *Islam dan Demokrasi*, Selangor: PTS Publication&Distribution.
- Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Menemukan Demokrasi*, Surakarta: UMS PRESS.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Andrey Sujadmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Depok: Rajawali Pers.
- Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2008, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor, PT Sarana Komunikasi Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.
- M. Arskal Salim, 2000, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1984, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenadana Media Group, Jakarta.
- Safrudin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media.
- Shinta Agustina, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Ahmad Zaini, 2020, Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Volume 11, Nomor 1.

Bima Guntara, 2022, Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 22.

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2021, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi, Yustitia, Volume 15, Nomor 1.

Fauzi Iswari, 2020, Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6, Nomor 1.

I Made Vidi Jayananda, Inyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, 2021, Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2.

Jailani, 2015, Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Inovatif, Volume 8, Nomor 1.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I.

Kristian Megahputra Warong, 2020, Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial, Lex Administratum, Volume 8, Nomor 5.

Latipah Nasution, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Jurnal: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 3.

Maru Ongku, 2021, HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2:1.

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1.

Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, 2013, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, Vol 2 No 2.

Ratna Shofi Inayati, 2005, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol 2.

Tanang Haryanto, 2008, *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen*, dalam jurnal "Dinamika Hukum", Volume 8, Nomor 2.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online.

Andika Dwi, *Perjalanan Kasus Lord Luhut hingga Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas*, <https://metro.tempo.co/read/1819062/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-haris-azhar-dan-fatia-divonis-bebas>.

Badan Pusat Statistik, "*Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel*", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjM3IzI=/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-variabel>

Eko Ari Wibowo, "*Kebebasan Berpendapat Masih Dibatasi, Kontras Nilai Jokowi Masih Alergi Kritikan*", <https://nasional.tempo.co/amp/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan>.

Humas, "*Jamin Kebebasan Berpendapat, Presiden Terima Antara Achievement Award*", <https://setkab.go.id/jamin-kebebasan-berpendapat-presiden-terima-antara-achievement-award>

Kabar Latuarhary, "*Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital*", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital>.

Mochamad Januar Rizki, *Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis>.

M Rosenno Aji, “*Mereka yang Berhadapan dengan Polisi Setelah Kritik Pemerintahan Jokowi*”, <https://nasional.tempo.co/read/1432712/mereka-yang-berhadapan-dengan-polisi-setelah-kritik-pemerintahan-jokowi>.

Scholastica Gerintya, *Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE*, <https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dari-jerat-uu-ite>

Sejarah dan Sosial, “*Sejarah HAM di Indonesia dan Undang-Undang yang Membahasnya*”, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-ham-di-indonesia-dan-undang-undang-yang-membahasnya>.

Vina Oktavia, “*Dilaporkan ke Polisi karena Kritik Lampung, Bima Dapat Dukungan Publik*”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/18/dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-lampung-bima-dapat-dukungan-publik>

